MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-5606 | p-ISSN : 2797-5592
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/manajerial

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: KONSEP, PRINSIP, MODEL, DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Hasnawi[1], Haryuni[2], Januar Pandapotan[3], Ismawati[4], Sonny Muhammad Ikhsan Mangkuwinata [5], Saiful Bahri[6]
Universitas Almuslim, Aceh, Indonesia [1,2,3,4,5,6,]
e-mail: hasnawi.bugak@gmail.com [1], haryunimaryadi@gmail.com [2], januar.panjaitan@gmail.com[3], ismawati0071@gmail.com[4], sonnymim@umuslim.ac.id [5], saifulbahri@umuslim.ac.id [6],

Diterima: *13/10/2026*; Direvisi: *20/10/2026*; Diterbitkan: *4/11/2026*

ABSTRAK

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen fundamental dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu. Tanpa dukungan anggaran yang memadai dan tata kelola yang efektif, tujuan strategis pendidikan nasional sulit diwujudkan secara optimal. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konsep, prinsip pengelolaan, sumber pendanaan, model alokasi, serta implementasi pembiayaan dalam peningkatan mutu pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen regulasi, buku referensi, dan artikel jurnal ilmiah mutakhir. Hasil kajian membuktikan bahwa pembiayaan pendidikan menuntut proses manajerial yang utuh, mencakup perencanaan, pengalokasian, pengawasan, dan pertanggungjawaban dana. Model pembiayaan kontekstual seperti *foundation plan* dan *equalization* relevan diterapkan guna mereduksi disparitas kapasitas fiskal antardaerah. Tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu layanan sarana serta iklim pembelajaran di satuan pendidikan.

Kata Kunci: *akuntabilitas*, *manajemen pembiayaan*, *model pembiayaan*, *mutu pendidikan*, *pembiayaan pendidikan*

ABSTRACT

Educational financing serves as a fundamental component in delivering quality education. Without adequate financial resources and effective governance, national educational objectives cannot be accomplished optimally. This study aims to examine comprehensively the concepts, managerial principles, funding sources, allocation models, and financing implementation in improving educational quality. The methodology employed is a library research approach examining regulatory frameworks, textbooks, and contemporary scholarly journals. The findings demonstrate that educational financing requires an integrated managerial continuum encompassing financial planning, resource allocation, auditing, and fiscal accountability. Contextual financing models such as foundation plan and equalization schemes are essential to mitigate fiscal capacity disparities across regions. Transparent, accountable, and participatory financial governance significantly enhances the quality of educational facilities and academic learning environments.

Keywords: *accountability, educational financing, financial management, financing models, quality of education*

Copyright (c) 2026 MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i4.16476

MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-5606 | p-ISSN : 2797-5592
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/manajerial

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan investasi strategis dalam membangun kualitas peradaban manusia serta mendorong pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Akselerasi transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut tersedianya layanan pendidikan yang bermutu, merata, dan berdaya saing global. Penyelenggaraan layanan pembelajaran yang unggul tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sumber daya finansial yang dialokasikan secara berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan mencakup keseluruhan proses pengadaan, pemanfaatan, pelaporan, dan audit dana operasional yang diorientasikan langsung untuk menunjang ketercapaian target capaian belajar (Mangkuwinata, 2024). Pengelolaan anggaran yang sistematis menjadi prasyarat mutlak agar setiap satuan pendidikan mampu mengoptimalkan fungsi kelembagaannya.

Pemerintah Indonesia secara yuridis telah meletakkan landasan normatif yang kuat terkait pembiayaan pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan alokasi sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan. Kebijakan tersebut dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang mengatur distribusi tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kehadiran regulasi ini merupakan wujud nyata komitmen konstitusional dalam menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh akses pendidikan dasar tanpa diskriminasi.

Meskipun alokasi anggaran secara nasional telah memenuhi amanat konstitusi, disparitas mutu dan tata kelola anggaran pendidikan di lapangan masih menghadapi tantangan serius. Data empiris menunjukkan terjadinya kesenjangan pembiayaan yang tajam antarwilayah dan jenjang pendidikan, terutama antara sekolah di perkotaan dengan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (Sari & Wibowo, 2024). Sebagian satuan pendidikan swasta dan perguruan tinggi daerah mengalami keterbatasan likuiditas akibat ketergantungan yang berlebih pada sumbangan pembinaan pendidikan dari orang tua siswa. Di sisi lain, rendahnya kapasitas manajerial pengelola keuangan dan minimnya transparansi penggunaan anggaran satuan pendidikan berpotensi menghambat optimalisasi sarana pembelajaran.

Penelitian empiris membuktikan bahwa peningkatan anggaran semata tidak otomatis mendongkrak mutu pendidikan apabila tidak diimbangi oleh sistem manajerial yang profesional. Manajemen keuangan yang adaptif berfungsi mengoptimalkan alokasi belanja operasional dan belanja modal ke sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung pada mutu pembelajaran siswa (Dhori et al., 2022). Efektivitas belanja pendidikan terbukti menjadi faktor determinan dalam penyediaan fasilitas laboratorium, buku teks, dan pelatihan kompetensi pedagogik guru (Mustar, 2017). Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel mampu menumbuhkan partisipasi publik dan komite sekolah dalam mendukung program-program inovatif sekolah (Mulyasa, 2021).

Meskipun diskursus mengenai anggaran pendidikan sering diteliti, kajian komprehensif yang mengintegrasikan aspek konseptual, prinsip manajerial, model matematis pengalokasian, dan implementasinya di tingkat kelembagaan masih terbatas. Kajian terdahulu lebih banyak memusatkan perhatian pada aspek teknis pencairan bantuan operasional sekolah tanpa membedah pemilihan model pembiayaan yang kontekstual. Oleh karena itu, artikel ini disusun untuk mengisi celah literatur tersebut dengan mengkaji secara komprehensif konsep, prinsip, sumber, model pembiayaan pendidikan, serta strategi implementasinya dalam peningkatan mutu pendidikan.

Copyright (c) 2026 MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i4.16476

MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-5606 | p-ISSN : 2797-5592
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/manajerial

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*). Desain ini dipilih karena fokus penyelidikan diarahkan pada penelaahan kritis, analisis tematik, dan sintesis konseptual terhadap berbagai teks akademik, regulasi perundang-undangan, dan laporan hasil riset pembiayaan pendidikan. Penelitian dilaksanakan di lingkungan Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Universitas Almuslim, Bireuen, Aceh, pada rentang waktu bulan Maret hingga Juli 2024. Waktu tersebut dimanfaatkan untuk mengumpulkan data kepustakaan, melakukan verifikasi literatur, dan mengonstruksi kerangka pemikiran teoretis yang terpadu.

Objek material penelitian ini adalah dokumen tertulis dan literatur ilmiah mutakhir yang relevan dengan ranah manajemen pembiayaan pendidikan. Sumber data primer meliputi dokumen kebijakan resmi negara, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, serta buku referensi manajemen pembiayaan (Mangkuwinata, 2024). Sementara itu, sumber data sekunder dihimpun dari artikel jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional yang diterbitkan dalam rentang waktu lima tahun terakhir (Dhori et al., 2022; Sari & Wibowo, 2024). Keberagaman sumber literatur ini memberikan basis teoretis yang kredibel dalam memotret dinamika tata kelola keuangan pendidikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi kepustakaan secara bertahap dan sistematis. Peneliti melakukan penelusuran digital melalui pangkalan data jurnal ilmiah terakreditasi seperti Sinta, Scopus, dan Google Scholar dengan kata kunci pencarian pembiayaan pendidikan, model pembiayaan, akuntabilitas keuangan, dan mutu pendidikan. Seluruh literatur yang terjaring diverifikasi keaslian dan relevansi isinya terhadap fokus penelitian sebelum dimasukkan ke dalam basis data telaah. Dokumen yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan variabel mutu dan model pembiayaan dikeluarkan dari unit analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan sintesis analitis. Tahapan analisis mencakup kondensasi teks penting, kategorisasi tematik berdasarkan indikator prinsip dan model pembiayaan, serta interpretasi hubungan kausal antara tata kelola dana dengan capaian mutu lembaga. Uji keabsahan data kepustakaan dilakukan melalui teknik triangulasi sumber rujukan dan kritik naskah, yakni membandingkan pandangan antarteori serta mencocokkannya dengan temuan empiris lapangan. Hasil sintesis tersebut kemudian diformulasikan ke dalam bentuk matriks konseptual dan narasi deskriptif yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil kajian literatur mengonfirmasi bahwa pembiayaan pendidikan merupakan rangkaian aktivitas manajerial menyeluruh yang mencakup perolehan sumber dana, pengalokasian anggaran, pengawasan belanja, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan secara transparan. Keberhasilan pembiayaan diukur dari sejauh mana anggaran yang dibelanjakan mampu menstimulasi peningkatan mutu proses pembelajaran dan pemenuhan sarana belajar. Berdasarkan komparasi teori alokasi dana publik, terdapat lima model pembiayaan pendidikan yang diidentifikasi memiliki karakteristik sasaran dan mekanisme komputasi yang berbeda. Rangkuman karakteristik, keunggulan, serta kelemahan dari masing-masing model pembiayaan tersebut disajikan secara komparatif pada Tabel 1.

Copyright (c) 2026 MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i4.16476

MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-5606 | p-ISSN : 2797-5592
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/manajerial

Tabel 1. Perbandingan Model-Model Alokasi Pembiayaan Pendidikan

Model Pembiayaan	Basis Pengalokasian	Keunggulan Utama	Kelemahan/Tantangan
Flat Grant Model	Jumlah flat yang sama per siswa/sekolah tanpa pembedaan daerah	Administrasi pencairan dana sangat sederhana dan cepat	Mengabaikan ketimpangan kapasitas fiskal antardaerah
Foundation Plan Model	Pemenuhan standar biaya minimum pelayanan dasar per siswa	Menjamin standar mutu pendidikan minimum bagi seluruh siswa	Kurang mendorong inisiatif inovasi fiskal daerah kaya
Percentage Equalizing	Persentase subsidi berbasis indeks kemampuan ekonomi lokal	Mereduksi beban fiskal pada daerah berpenghasilan rendah	Menuntut validitas data kapasitas riil ekonomi daerah
Power Equalizing	Penyelarasan kemampuan penerimaan pajak antardaerah	Daerah miskin memperoleh dana setara dengan upaya pajak yang sama	Rumit dalam formulasi perhitungan penerimaan pajak
Full State Funding	Sentralisasi pembiayaan penuh dari anggaran pemerintah	Menghilangkan disparitas fasilitas antarsekolah secara total	Membatasi otonomi sekolah dan inisiatif swadaya masyarakat

Data yang disajikan pada Tabel 1 menegaskan bahwa setiap model alokasi pembiayaan memiliki orientasi kebijakan yang berbeda dalam menjawab tantangan fiskal pendidikan. Model *flat grant* pada Tabel 1 menunjukkan kemudahan dalam aspek birokrasi, namun rentan melestarikan ketidakadilan alokasi bagi satuan pendidikan di daerah tertinggal. Sebaliknya, model *foundation plan* dan *percentage equalizing* memberikan proteksi berupa kepastian terpenuhinya kebutuhan operasional dasar sekolah secara proporsional. Formulasi pembiayaan berbasis kesetaraan (*equalization*) sebagaimana dirangkum pada Tabel 1 menjadi rujukan mendasar bagi otoritas pendidikan dalam menentukan skema intervensi anggaran yang berkeadilan.

Selain pengelompokan model pembiayaan, temuan telaah pustaka menunjukkan bahwa sumber pendanaan pendidikan di Indonesia bersifat plural dan multilateral. Dana pendidikan bersumber dari sektor publik (APBN dan APBD), kontribusi internal lembaga, serta partisipasi sektor filantropi masyarakat seperti zakat, wakaf, dan *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan (Yusra & Riyaldi, 2020; Yusran & Riyaldi, 2023). Dalam tataran manajerial, pelaksanaan anggaran pendidikan dipandu oleh enam prinsip utama, yaitu keadilan, efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut terbukti memicu distorsi alokasi yang menghambat ketercapaian standar pelayanan minimal pendidikan.

Pembahasan

Temuan kajian ini menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan bertindak sebagai instrumen determinan dalam menjembatani kebijakan makro pendidikan dengan pencapaian mutu mikro di ruang-ruang kelas. Ketersediaan anggaran yang terkelola secara memadai memungkinkan sekolah melengkapi sarana laboratorium sains, meremajakan teknologi informasi, menyediakan buku bacaan berkualitas, dan mendanai kegiatan ekstrakurikuler siswa

Copyright (c) 2026 MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i4.16476

MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2026
e-ISSN : 2797-5606 | p-ISSN : 2797-5592
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/manajerial

(Mangkuwinata et al., 2025). Temuan ini sejalan dengan simpulan Mustar (2017) yang menyatakan bahwa alokasi pembiayaan yang terarah pada fasilitas belajar berkontribusi positif terhadap motivasi belajar peserta didik dan kenyamanan lingkungan kerja guru. Anggaran yang memadai memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan untuk mengimplementasikan diferensiasi pembelajaran secara efektif (Amalia & Ahmad, 2023; Nursaida et al., 2025; Pebriyanti, 2023; Sulistyosari et al., 2022).

Meskipun demikian, besaran anggaran yang diterima lembaga tidak serta merta menjadi penentu tunggal peningkatan kualitas pendidikan apabila tidak diiringi efektivitas kepemimpinan manajerial. Prinsip tata kelola yang efisien, transparan, dan akuntabel menjadi prasyarat mutlak agar dana pendidikan terbebas dari kebocoran dan pemborosan anggaran (Mulyasa, 2021). Sekolah yang melibatkan komite sekolah, guru, dan perwakilan orang tua dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) terbukti menunjukkan akuntabilitas program yang lebih tinggi (Dhori et al., 2022). Partisipasi aktif para pemangku kepentingan tersebut menciptakan sistem pengawasan internal yang kokoh, sehingga alokasi dana operasional benar-benar tertuju pada program-program prioritas pengembangan kompetensi siswa (Karmiyanti, 2021; Ottu et al., 2025; Sopian & Asqolani, 2022; Waruwu & Nuryani, 2021).

Dalam konteks penentuan model pembiayaan, penerapan skema pembiayaan tunggal secara seragam terbukti tidak lagi relevan bagi kondisi geografis Indonesia yang sangat majemuk. Sebagaimana diuraikan oleh Mangkuwinata et al. (2025), penerapan model kombinasi antara *foundation plan* dan *percentage equalizing* menjadi opsi terbaik untuk menjamin pemerataan mutu pendidikan. Model *foundation plan* memastikan tersedianya jaminan biaya operasional minimum per siswa di seluruh pelosok negeri, sementara *percentage equalizing* memberikan intervensi afirmatif bagi daerah dengan kemampuan fiskal rendah (Sari & Wibowo, 2024). Kebijakan asimetris semacam ini krusial untuk mencegah terjadinya jurang pemisah mutu pendidikan antara daerah maju dengan wilayah kepulauan dan pedalaman (Kamal et al., 2025; Nurulita et al., 2025; Purwaningsih, 2026; Wirian et al., 2022).

Terkait dengan keberlanjutan pembiayaan, diversifikasi sumber pendapatan menjadi strategi penting bagi lembaga pendidikan swasta dan perguruan tinggi seperti Universitas Almuslim. Ketergantungan yang mutlak pada biaya kuliah mahasiswa menimbulkan kerapuhan finansial saat terjadi fluktuasi ekonomi masyarakat atau penurunan angka pendaftaran mahasiswa baru. Lembaga pendidikan dituntut untuk mengoptimalkan potensi filantropi Islam, seperti pemberdayaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif guna mendukung beasiswa bagi kelompok rentan (Yusran & Riyaldi, 2023). Penguatan unit usaha mandiri kampus dan kemitraan riset terapan bersama dunia usaha dan industri juga menjadi pilar pendapatan baru (*revenue generator*) yang berkelanjutan (Yusra & Riyaldi, 2020). Keberhasilan diversifikasi tersebut pada akhirnya bergantung pada tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sebagaimana ditunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas merupakan fondasi utama pengelolaan dana pendidikan Islam (Salsabila & Nursita, 2026; Syamsiyah, 2025; Yusrawati & Januar, 2024).

Langkah strategis lain yang mendesak diterapkan adalah akselerasi digitalisasi sistem tata kelola keuangan satuan pendidikan. Pemanfaatan platform manajemen keuangan digital seperti Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memangkas birokrasi pelaporan serta mempermudah audit realisasi anggaran secara tepat waktu. Transparansi data belanja berbasis aplikasi daring mempersempit ruang terjadinya manipulasi nota transaksi dan meningkatkan kepercayaan lembaga donor maupun orang tua siswa (Mangkuwinata, 2024). Namun demikian, digitalisasi ini menuntut peningkatan

Copyright (c) 2026 MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i4.16476

literasi keuangan dan kompetensi teknologi bagi para kepala sekolah dan bendahara agar pemanfaatan peranti lunak tersebut tidak sekadar menjadi formalitas administratif.

KESIMPULAN

Pembiayaan pendidikan merupakan kesatuan proses manajerial strategis yang mencakup perencanaan partisipatif, pengalokasian proporsional, pemanfaatan efisien, serta audit pertanggungjawaban keuangan yang transparan demi meningkatkan mutu pembelajaran. Kajian ini membuktikan bahwa pembiayaan pendidikan tidak dapat disederhanakan sebagai transaksi penyediaan dana belaka, melainkan membutuhkan ketepatan pemilihan model alokasi seperti kombinasi *foundation plan* dan *percentage equalizing* untuk mengatasi kesenjangan fiskal antarwilayah. Tata kelola keuangan satuan pendidikan yang berpijak pada prinsip transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas berkontribusi nyata terhadap pemenuhan standar sarana prasarana, penguatan kapasitas pendidik, serta terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif bagi peningkatan prestasi belajar peserta didik.

Hasil kajian ini mengimplikasikan perlunya pembenahan regulasi penganggaran afirmatif oleh pemerintah pusat dan daerah guna memastikan terserapnya belanja modal pendidikan ke wilayah-wilayah dengan kapasitas fiskal terbatas. Bagi pengelola satuan pendidikan dan yayasan penyelenggara, disarankan untuk mengoptimalkan diversifikasi pendapatan melalui kemitraan strategis dengan dunia industri serta pemanfaatan dana filantropi pendidikan secara produktif. Lembaga pendidikan juga perlu memprioritaskan pelatihan literasi keuangan dan pemanfaatan sistem pelaporan digital bagi tim manajemen sekolah demi menjamin akuntabilitas belanja. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan pengujian empiris kuantitatif berskala luas guna mengukur besaran elastisitas pembiayaan modal terhadap indeks capaian literasi dan numerasi siswa di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, I. Z., & Ahmad, M. (2023). Manajemen pembiayaan di sekolah luar biasa dalam meningkatkan kualitas pendidikan: Studi kasus SLB di Padang. *MANAZHIM: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, *5*(2), 893–905. https://doi.org/10.36088/manazhim.v5i2.3574

Dhori, M., Aflah, N., Siswadi, S., & Lessy, Z. (2022). Manajemen pembiayaan pendidikan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dalam upaya peningkatan mutu. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, *8*(1), 173–184. https://doi.org/10.32884/ideas.v8i1.624

Kamal, S. A. R., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). Indeks keadilan pembiayaan pendidikan antarprovinsi di Indonesia: Analisis disparitas dan implikasi kebijakan pendidikan nasional. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, *12*(4), 1041–1052. https://doi.org/10.38048/jipcb.v12i4.5912

Karmiyanti, N. K. (2021). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) terhadap partisipasi komite sekolah. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, *2*(1), 42–66. https://doi.org/10.32795/hak.v2i1.1490

Mangkuwinata, S. M. I. (2024). *Manajemen pembiayaan pendidikan*. Widina Media Utama.

Mangkuwinata, S. M. I., Nova, A., Buchari, Rahmawaty, F., & Suriyani. (2025). Models of financing in education. *JIEM: Journal Informatic, Education and Management*, *7*(2), 473–478. https://doi.org/10.61992/jiem.v7i2.158

Mulyasa, E. (2021). *Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi*. Remaja Rosdakarya.

Copyright (c) 2026 MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i4.16476

Mustar. (2017). Manajemen pembiayaan pendidikan menuju pendidikan yang bermutu. *Jurnal ANSIRU PAI*, *1*(2), 75–88. https://doi.org/10.30821/ansiru.v1i2.1245

Nursaida, N., Himmah, A., & Munastiwi, E. (2025). Implementasi biaya pendidikan terhadap peningkatan sarana dan prasarana di SMA Sahabatqu Yogyakarta. *Tafhim Al-'Ilmi*, *16*(2), 368–380. https://doi.org/10.37459/tafhim.v16i02.273

Nurulita, A., Rohmaniyyah, U. A., Shaleh, & Muhammad, M. B. (2025). Combination of power equalizing education financing model and flat grand model (efforts to equalize education in Indonesia). *Studia Manageria*, *7*(2), 129–142. https://doi.org/10.19109/studiamanageria.v7i2.28578

Ottu, I. R., Pau, S. P. N., & Dethan, M. A. (2025). Pengaruh kompetensi SDM, partisipasi masyarakat dan SPI terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana BOS di SMA/SMK Negeri di Kota Kupang. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, *5*(3), 486–503. https://doi.org/10.55606/jebaku.v5i3.5986

Pebriyanti, D. (2023). Pengaruh implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik tingkat sekolah dasar. *Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi*, *5*(1), 89–96. https://doi.org/10.53863/kst.v5i01.692

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91.

Purwaningsih, M. R. (2026). Distribusi anggaran pendidikan dan dinamika ketimpangan antarwilayah di Indonesia. *Bappenas Working Papers*, *9*(1), 130–162. https://doi.org/10.47266/bwp.v9i1.454

Salsabila, N. A., & Nursita, L. (2026). Strategi penganggaran pendidikan Islam dalam mewujudkan manajemen keuangan yang profesional. *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan*, *5*(2), 163–173. https://doi.org/10.24252/edu.v5i2.61309

Sari, K., & Wibowo, A. (2024). Kajian problematika mahalnya biaya pendidikan yang ada di Indonesia. *Jurnal PGSD Indonesia*, *10*(1), 45–56. https://doi.org/10.26877/jpgsdi.v10i1.1892

Sopian, S., & Asqolani, A. (2022). Mengukur akuntabilitas dana bantuan operasional sekolah. *Journal of Applied Managerial Accounting*, *6*(1), 59–80. https://doi.org/10.30871/jama.v6i1.3921

Sulistyosari, Y., Karwur, H. M., & Sultan, H. (2022). Penerapan pembelajaran IPS berdiferensiasi pada Kurikulum Merdeka Belajar. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, *7*(2), 66–75. https://doi.org/10.15294/harmony.v7i2.62114

Syamsiyah, N. E. (2025). Strategi efektif dalam perencanaan biaya dan optimalisasi sumber pendanaan satuan pendidikan Islam. *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi*, *6*(2), 293–304. https://doi.org/10.35912/simo.v6i2.4555

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

Waruwu, M., & Nuryani, L. K. (2021). Studi kasus penerapan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, *5*(5), 3822–3828. https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i5.1336

Wirian, O., Agustina, N., & Siahaan, A. (2022). Model-model pembiayaan pendidikan. *Educate: Journal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, *1*(1), 15–24. https://doi.org/10.56114/edu.v1i1.211

Copyright (c) 2026 MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i4.16476

Yusra, M., & Riyaldi, M. H. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh: Analisis persepsi muzakki. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, *11*(2), 175–190. https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.712

Yusran, J., & Riyaldi, M. H. (2023). Optimalisasi pendayagunaan zakat di Baitul Mal Aceh untuk program beasiswa pendidikan. *Indonesian Journal of Religion Center*, *1*(1), 12–25. https://doi.org/10.59623/ijrc.v1i1.12

Yusrawati, Y., & Januar, J. (2024). Perencanaan keuangan yang efektif untuk menjamin keberlangsungan lembaga pendidikan Islam. *Al-Marsus: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *2*(2), 115–127. https://doi.org/10.30983/al-marsus.v2i2.8839

Copyright (c) 2026 MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan
https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i4.16476